

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 pada unit kerja BAPPEDA Kabupaten Bantul yang membidangi urusan perencanaan pada umumnya telah dikerjakan seluruhnya sesuai rencana. Tahun ini melaksanakan 19 program dan 64 kegiatan.

Secara keseluruhan, rencana alokasi pembiayaan untuk keseluruhan kegiatan Bappeda sampai dengan triwulan keempat adalah sebesar Rp7.752.602.000,00. Sedangkan realisasi penggunaan dana sampai triwulan keempat sebesar Rp6.176.013.387,00 atau sebesar 79,66%.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2016 secara umum berjalan lancar dan memiliki tingkat keberhasilan yang baik.

Terdapat tiga sasaran yang ditetapkan, capaian kinerja sasaran yang berhasil diwujudkan pada tahun 2016 adalah sbb.:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Keselarasn Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD	100%
		Persentase Rata-Rata Pencapaian Target Kinerja	90%
		Persentase Program Kegiatan RKPD sesuai Musrenbang	70%
2.	Meningkatnya masyarakat miskin penerima program kemiskinan	Persentase masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan	100%
3	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	72%
		Persentase cakupan pengendalian tata ruang	82%

Bermula dari pelaksanaan kegiatan maka penilaian terhadap kinerja sasaran dipengaruhi pula oleh berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi kinerja sasaran tidak hanya dipengaruhi oleh satu kegiatan, tetapi pada umumnya saling mempengaruhi sehingga pada keadaan normal rata-rata kinerja sasaran akan lebih baik dari rata-rata kinerja kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul adalah merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No: 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas atau satuan organisasi lain dilingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Koordinasi dalam rangka penelitian untuk kepentingan perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Koordinasi dalam rangka monitoring pelaksanaan program Pembangunan Daerah.
- e. Verifikasi rencana program/proyek pembangunan Daerah.
- f. Penyusunan laporan, evaluasi dan data pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan sesuai petunjuk Bupati.

1.2 Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. Lingkup analisis lingkungan strategis mencakup Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

Analisis Lingkungan Internal (ALI)

KEKUATAN (STRENGTH)

1. Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang cukup memadai;
2. Adanya kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal di antara Instansi/Unit Kerja, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian dan semua stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan;
3. Adanya kewenangan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan fungsi sinkronisasi semua perencanaan yang diajukan oleh Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Unit dan semua stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan daerah;
4. Telah terjalinnya hubungan komunikasi yang baik dengan jajaran Pemerintah Propinsi dan Jajaran Pemerintah Pusat;
5. Tersedianya data, informasi dan dokumen perencanaan pembangunan dan berbagai bentuk teknik perencanaan yang dikuasai;
6. Adanya forum dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan daerah

KELEMAHAN (WEAKNESS)

1. Adanya pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang masih cenderung eksklusif dan kurang responsif (sesuai pengamatan Bapak Bupati Bantul);
2. Kurangnya kebersamaan dan kurang dipahaminya visi bersama dari semua stakeholders Bappeda dalam memenuhi tugas dan panggilan;
3. Kurangnya dijiwainya mentalitet perencana yang handal, antisipatif, responsif dan akuntabel dalam memandang, mengevaluasi, menganalisis dan menyajikan rencana secara holistik;
4. Kurangnya penguasaan medan dan tugas panggilan;
5. Belum meratanya kemampuan berkomunikasi dan lobby dengan pihak luar;
6. Kurang dimanfaatkannya secara optimal data, informasi dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia.

Dilihat dari Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), yang pada hakekatnya unsur kuncinya terletak pada *Peluang dan Ancaman*, adalah sebagai berikut :

PELUANG (OPPORTUNITY)

1. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjadikan Bappeda sebagai satu-satunya institusi pelaksana koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Banyaknya kerjasama yang ditawarkan dari pihak luar (antar daerah, investor, negara donor dan masyarakat dalam pembangunan daerah).
3. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Bantul untuk berpihak kepada rakyat secara konsisten.
4. Adanya tuntutan dari rakyat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat dominan agar birokrasi bekerja lebih profesional.
5. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi.
6. Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan Good Governance dalam seluruh siklus manajemen pemerintahan.

Ancaman (*Threat*)

1. Masih adanya sisa-sisa paradigma egoisme sektoral yang masih ada.
2. Belum semua stakeholders di daerah memahami materi dan esensi RPJP, RPJM, RKPD, Renstra/Renja SKPD.
3. Adanya kompetisi yang sangat ketat antar daerah dalam pembangunan dan peraihan dana non APBD masing-masing daerah otonom.
4. Banyak daerah-daerah otonom yang mempunyai komunikasi dan kemampuan lobby tinggi.
5. Masih belum mantapnya sistem, mekanisme peluncuran anggaran dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
6. Adanya kecenderungan dampak negatif reformasi.

TABEL 1

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weaknesses)
<p>1) Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang cukup memadai;</p> <p>2) Adanya kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal di antara Instansi/Unit Kerja, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian dan semua stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan;</p> <p>3) Adanya kewenangan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan fungsi sinkronisasi semua perencanaan yang diajukan oleh Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Unit dan semua stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan daerah;</p> <p>4) Telah terjalinnya hubungan komunikasi yang baik dengan jajaran Pemerintah Propinsi dan Jajaran Pemerintah Pusat;</p> <p>5) Tersedianya data, informasi dan dokumen perencanaan pembangunan dan berbagai bentuk teknik perencanaan yang dikuasai;</p> <p>6) Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> dalam seluruh siklus manajemen pemerintahan.</p>	<p>1) Adanya pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang masih cenderung eksklusif dan kurang responsif (sesuai pengamatan Bapak Bupati Bantul);</p> <p>2) Kurangnya kebersamaan dan kurang dipahaminya visi bersama dari semua stakeholders Bappeda dalam memenuhi tugas dan panggilan;</p> <p>3) Kurangnya dijiwainya mentalitas perencana yang handal, antisipatif, responsif dan akuntabel dalam memandang, mengevaluasi, menganalisis dan menyajikan rencana secara holistik;</p> <p>4) Kurang dimanfaatkannya secara optimal data, informasi dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia.</p>

TABEL 2
FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG (Opportunities)	ANCAMAN (Treaths)
<p>1) Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjadikan Bappeda sebagai satu-satunya institusi pelaksana koordinasi perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>2) Banyaknya kerjasama yang ditawarkan dari pihak luar (antar daerah, investor, negara donor dan masyarakat dalam pembangunan daerah.</p> <p>3) Adanya komitmen pemerintah kabupaten Bantul untuk berpihak kepada rakyat secara konsisten.</p> <p>4) Adanya tuntutan dari rakyat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat dominan agar birokrasi bekerja lebih profesional.</p> <p>5) Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi.</p> <p>6) Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> dalam seluruh siklus manajemen pemerintahan.</p>	<p>1) Masih adanya sisa-sisa paradigma egoisme sektoral yang masih dominan.</p> <p>2) Belum semua stakeholders di daerah memahami materi dan esensi RPJP, RPJM, RKPD, Renstra/Renja SKPD.</p> <p>3) Adanya kompetisi yang sangat ketat antar daerah dalam pembangunan dan peraihan dana non APBD masing-masing daerah otonom.</p> <p>4) Adanya kecenderungan dampak negatif reformasi.</p>

1.3 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, terdapat tiga isu sentral dan bersifat sangat esensial dan mendasara. Tiga isu itu merupakan keberhasilan yang harus diperhatikan setiap stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu : **pertama** *sharing of power* (pembagian kewenangan), **kedua** *distribution of income* (pemerataan pendapatan), dan **ketiga** *empowering* (pemberdayaan dan partisipasi).

Dalam kerangka itu, faktor-faktor penentu keberhasilan yang terutama adalah terletak pada :

1. Terciptanya sistem kerja yang dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan komitmen visi bersama yang ditandai dengan adanya keseimbangan antara tugas/wewenang dan haknya.
2. Tersedianya SDM yang berkualitas, visioner, mampu dan mau berkerja secara bermoral dan bermartabat.
3. Tersedianya data yang akurat & mutakhir berbasis teknologi informasi.
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.
5. Tingginya peran serta masyarakat dan swasta dalam perencanaan yang ditandai dengan semakin akomodatifnya produk perencanaan.
6. Peraturan perundangan beserta PP-nya tersedia lengkap, mudah dipahami dan tidak cepat berubah;

1.4 Struktur Organisasi

Stuktur organisasi Bappeda yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian, yaitu sub bagian umum, program, dan keuangan dan aset. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;
- e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas;

- f. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan;
- h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

3. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan

Bidang ini terdiri dari dua sub bidang, yaitu sub bidang Data, Statistik dan Pelaporan dan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan kerja;
- c. menyiapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan perencanaan bidang penelitian, pengembangan, informatika, statistik, dan kearsipan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, kemasyarakatan dan iptek;
- g. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pengembangan potensi daerah;
- h. menyelenggarakan konsultasi kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
- i. menyelenggarakan perencanaan pembangunan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
- j. menyelenggarakan koordinasi penelitian dan pengembangan kelembagaan dan manajemen pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di kecamatan/desa.
- k. menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan;
- l. menyelenggarakan koordinasi penelitian dan pengembangan kebijakan pemerintah daerah;

- m. menyelenggarakan koordinasi penyusunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan masyarakat;
- n. menyelenggarakan koordinasi kerjasama dengan lembaga, institusi dan daerah lain di bidang data, penelitian dan pengembangan iptek;
- o. menyelenggarakan evaluasi hasil pelaksanaan penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Kuliah Kerja Lapangan, Praktek Kerja Profesi, Praktek Kerja lapangan, Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh lembaga maupun perorangan;
- p. menyelenggarakan evaluasi penelitian dan pengembangan data hasil pembangunan;
- q. menyelenggarakan koordinasi penyusunan data base profil daerah dan LKPJ Bupati;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan publikasi APBD dan LKPJ Bupati;
- s. menyelenggarakan koordinasi pengembangan dan pengolahan data tematik;
- t. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- u. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- w. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- x. mengevaluasi dan menyusun sistem inovasi daerah.

4. Bidang Perekonomian

Bidang perekonomian terbagi kedalam dua sub bidang, yaitu Sub Bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Kelautan, dan Sub Bidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Bidang perekonomian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan perencanaan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, pengembangan dunia usaha, pengembangan ekonomi lokal, koperasi, penanaman modal dan pengelolaan pasar;
- e. menyelenggarakan koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri dalam pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, pengembangan dunia usaha, pengembangan ekonomi lokal, koperasi, penanaman modal dan pengelolaan pasar;
- f. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

- g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. menyusun dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas.

5. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas sub bidang Sarana dan Prasarana dan Penataan Ruang, dan sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja,
- c. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan perencanaan pembangunan bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman, sumber daya air, sarana prasarana perhubungan, telekomunikasi, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
- e. menyelenggarakan koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman, sumber daya air, sarana prasarana perhubungan, telekomunikasi, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman, standar dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perdesaan dan perkotaan;
- g. menyusun rencana pengembangan wilayah tertinggal, kawasan perbatasan, dan pesisir;
- h. menyusun rencana pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
- i. menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta dalam dan luar negeri;
- j. menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perdesaan dan perkotaan;
- k. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya; dan
- n. menyusun dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas.

6. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan

Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan terdiri atas dua sub bidang, yaitu sub bidang Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan sub bidang Kesehatan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda, olahraga, perpustakaan, keluarga berencana, dan fasilitasi urusan agama;
- e. menyusun rencana pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda, olahraga, perpustakaan, keluarga berencana, dan fasilitasi urusan agama;
- f. menyelenggarakan koordinasi pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda, olahraga, perpustakaan, keluarga berencana, dan fasilitasi urusan agama;
- g. menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda, olahraga, perpustakaan, keluarga berencana, dan fasilitasi urusan agama;
- h. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

7. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ada dua sub bidang dalam bidang ini, yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan catatan sipil,

- ketenagakerjaan dan transmigrasi; perlindungan perempuan dan anak, keluarga sejahtera, sosial, dan pertanahan;
- e. menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - f. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
 - g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

8. Bidang Pengendalian Program

Bidang Pengendalian Program terdiri atas Sub Bidang Penganggaran dan Sub Bidang Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. menyelenggarakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah ;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- h. menyelenggarakan bimbingan supervisi dan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- i. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
- j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- k. menyelenggarakan koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- l. menyelenggarakan koordinasi penggunaan dan pengendalian dana Tugas Pembantuan (dekonsentrasi) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- m. menyelenggarakan verifikasi usulan program pembangunan daerah;
- n. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan

- o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- p. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya.
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya.
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.
- d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya.
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2016 – 2021 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Renstra Bappeda Kabupaten Bantul yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016 akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Keselarasn Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD	100%
		Persentase Rata-Rata Pencapaian Target Kinerja	90%
		Persentase Program Kegiatan RKPD sesuai Musrenbang	70%
2.	Meningkatnya masyarakat miskin penerima program kemiskinan	Persentase masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan	100%

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, dilakukan program kegiatan sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.715.145.000,00	APBD
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.223.710.000,00	APBD
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	224.980.000,00	APBD
	Program Kerjasama Pembangunan	20.880.000,00	APBD
2.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	996.656.500,00	APBD

Jumlah Anggaran : Rp4.181.371.500,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2016 tidak dapat berjalan semestinya. Adanya himbauan untuk melakukan efisiensi dan penundaan anggaran kegiatan, menjadikan kegiatan berjalan tidak lancar. Ada kendala yang ditemui dalam perjalanan kegiatan, diantaranya adalah berkaitan dengan proses pengadaan. Sempitnya waktu yang tersedia setelah perubahan anggaran disepakati, tidak memungkinkan dilakukan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan. Hal ini berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya kegiatan sampai tahun anggaran berakhir.

Untuk mengetahui pemanfaatan anggaran 2016 dalam rangka mewujudkan rencana kinerja yang telah ditetapkan dilakukan analisis sebagai berikut.

7) PENCAPAIAN KINERJA

3.1.1. Target dan realisasi kinerja 2016

Setelah melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2016, capaian kinerja yang berhasil diwujudkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD	100%	100%
		Persentase Rata-Rata Pencapaian Target Kinerja	90%	90%
		Persentase Program Kegiatan RKPD sesuai Musrenbang	70%	70%
2.	Meningkatnya masyarakat miskin penerima program kemiskinan	Persentase masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan	100%	100%

a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran strategis ini dapat terukur dengan tiga indikator, yaitu:

1. Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD

Rencana kerja pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan (RKPD 2016) secara normative merupakan jabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD 2016-2021) yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

Dari kegiatan pengendalian diketahui bahwa pada dasarnya RKPD 2016 sudah mengacu pada RPJMD.

2. **Persentase Rata-Rata Pencapaian Target Kinerja**

Pengukuran capaian target kinerja dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulan) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 lampiran VII tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Data capaian kinerja tahun 2016 diketahui dari capaian kinerja pada triwulan IV 2016.

3. **Persentase Program Kegiatan RKPD sesuai Musrenbang**

Persentase ini diketahui dengan cara menyangdingkan program kegiatan RKPD 2016 dengan program kegiatan usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2015.

b. Meningkatkan masyarakat miskin penerima program kemiskinan

Sasaran strategis ini diukur dengan persentase masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang masuk dalam adalah:

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor... tahun 2015 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diamanatkan untuk mengawal capaian tiga indikator, yaitu: angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Capaian ketiga indikator adalah sebagai berikut.

1. **Angka kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dapat diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2011: 31). Dengan pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita

setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Tabel 3.1
Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2012-2016

NO.	TAHUN	ANGKA KEMISKINAN (%)
1	2012	16,97
2	2013	16,48
3	2014	15,89
4	2015	16,33
5	2016	15,7 ^{**)}

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2017

***) Sangat sementara*

Pada RPJMD 2016-2021 angka memiskinkan tahun 2016 ditetapkan sebesar 14,41%. Data dari BPS di atas menunjukkan angka kemiskinan tahun 2016 15,7%. Hal ini berarti target angka kemiskinan tahun 2016 tidak tercapai, walaupun dari tahun 2012 angka kemiskinan di Kabupaten Bantul terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Dari data BPS terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 mencapai 15,70% lebih rendah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2015 sebesar 16,33%.

2. Pertumbuhan ekonomi

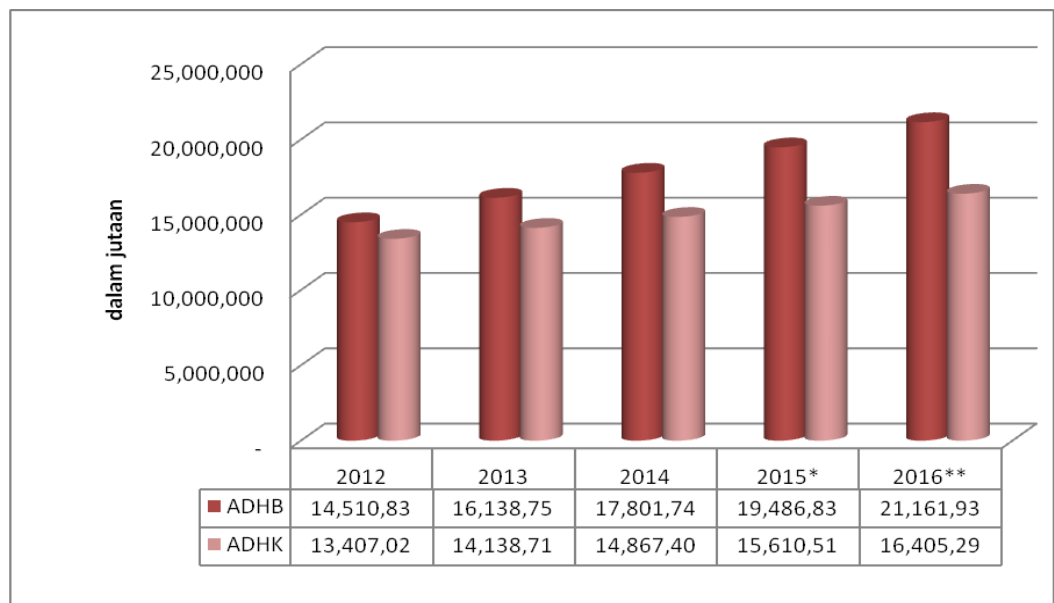
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Mulai tahun 2015 penghitungan PDRB menggunakan perubahan tahun dasar baru. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000. Selain itu metode penghitungan ini juga telah didasarkan pada SNA (System of National Account) 2008.

RPJMD menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,25%. BPS Bantul mengeluarkan data bahwa PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2016 sebesar Rp 21,16 trilyun meningkat sebesar 8,60% dari Tahun 2015, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan nilai PDRB pada Tahun 2016 mencapai Rp 16,41 trilyun meningkat sebesar 5,09% dari Tahun 2015. Hal ini berarti target RPJMD tahun 2016 tidak tercapai.

Faktor penyebab tidak tercapainya target ini adalah Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar pertama dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Nilai tambah dari sektor ini dalam menyumbang perekonomian Kabupaten Bantul tidak sebaik tahun sebelumnya.

Gambar

Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2012– 2016



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2017

Ket* = Angka sementara

Ket** = Angka sangat sementara

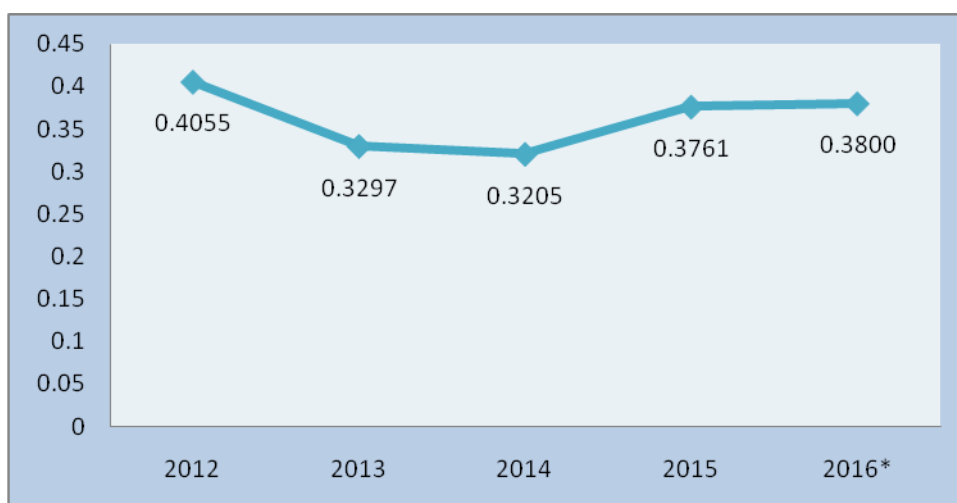
3. Pemerataan pendapatan

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk.

Target pemerataan pendapatan tahun 2016 di RPJMD sebesar 0,3149, sedangkan realisasinya sebesar 0,3800. Hal ini memberikan arti target tidak dapat tercapai.

Koefisien gini pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian, koefisien gini tahun 2016 sebesar 0,38 mengalami kenaikan 0,01 poin jika dibandingkan capaian pada tahun 2015 sebesar 0,3761. Meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran.

Gambar
Koefisien Gini di Kabupaten Bantul Tahun 2012–2016



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2017

Dari dua sasaran strategis dengan empat indikator capaian kinerja dapat dikelompokkan menjadi berhasil dan tidak berhasil.

Tabel 3.2 Capaian indicator kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Berhasil/ tidak berhasil
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	berhasil
		Persentase Rata-Rata Pencapaian Target Kinerja	90%	90%	berhasil
		Persentase Program Kegiatan RKPD sesuai Musrenbang	70%	70%	berhasil
2.	Meningkatnya masyarakat miskin penerima program kemiskinan	Persentase masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan	100%	100%	berhasil

3.1.2. Realisasi kinerja 2016

Bila dilihat capaian kinerja tahun 2016 ini, capaian sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Tabel 3.3 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Berhasil/ tidak berhasil
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Keselarasn Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	berhasil
		Persentase Rata-Rata Pencapaian Target Kinerja	90%	90%	berhasil
		Persentase Program Kegiatan RKPD sesuai Musrenbang	70%	70%	berhasil
2.	Meningkatnya masyarakat miskin penerima program kemiskinan	Persentase masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan	100%	100%	berhasil

3.1.3. Pencapaian kinerja 2016 dan renstra

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja 2016 dibanding Target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Keselarasn Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD	100%	100%
		Persentase Rata-Rata Pencapaian Target Kinerja	90%	90%
		Persentase Program Kegiatan RKPD sesuai Musrenbang	70%	70%
2.	Meningkatnya masyarakat miskin penerima program kemiskinan	Persentase masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan	100%	100%

Dalam hal mengawal target RPJMD 2016-2021 maka akan dilakukan perbandingan secara regional dan nasional.

3.1.4. Capaian kinerja dibandingkan nasional

Tidak semua indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dapat dibandingkan dengan capaian indicator nasional, karena hanya beberapa indikator saja yang secara umum digunakan dan ada di tingkat nasional. Indikator yang dapat dibandingkan adalah: pertumbuhan ekonomi, indeks gini, dan angka kemiskinan.

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja 2016 dibanding DIY dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2016	DIY	Nasional
Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,09%	5,05%	5,02%
Indeks gini	0,3800	0,425	0,397
Angka kemiskinan	15,70%	15,01%	10,86 ^{*4)}

3.1.5. Analisis

Indikator kinerja tahun 2016 ada beberapa yang tidak memenuhi yang ditargetkan, yaitu

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul selalu dipicu oleh beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi. Sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2016 terutama didukung oleh kinerja pada sektor konstruksi, jasa perusahaan, komunikasi, *real estate*, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, jasa keuangan, perdagangan besar dan eceran dan jasa jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2015. Adapun sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar pertama dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Nilai tambah dari sektor ini dalam menyumbang perekonomian Kabupaten Bantul tidak sebaik tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sebesar 5,09% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang mampu tumbuh 5,00%. Hal ini dikarenakan kategori industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Industri Kabupaten Bantul didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Industri skala kecil yang terkonsentrasi di lokasi tertentu membentuk sentra-sentra produk-produk tradisional (gerabah/ keramik, batik, keris, wayang dsb), yang produknya untuk pasar ekspor serta mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul masih lebih tinggi apabila

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,05% dan Nasional sebesar 5,02%.

2. Pemerataan pendapatan

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Koefisien Gini pada tahun 2016, dengan faktor perkalian baru yang ditentukan oleh BPS Pusat, diprediksikan sebesar 0,3800. Koefisien Gini tahun 2016 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Bantul semakin merata. Hal ini mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul relatif lebih baik dibandingkan pada tahun 2015 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga tetap memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah.

3. Angka kemiskinan

Target terpasang angka kemiskinan tahun 2016 sebesar 13%, realisasinya 15,70. Hal ini memberikan arti bahwa target gagal terwujud.

Upaya Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan.

Banyak hal telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ini, antara lain:

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain; menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras; mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro; menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), dibentuk atas amanat Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten. Maksud pembentukan TKPK adalah untuk mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan di kabupaten dan mengendalikan pelaksanaannya.

Mulai tahun 2016 telah diambil kesepakatan di tingkat DIY terhadap adanya Satu Data Kemiskinan (SDK), yaitu berdasarkan data dari TNP2K yang diperoleh melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2016. Selanjutnya target-target yang dipakai adalah berdasarkan data dari TNP2K.

Selanjutnya dilakukan sosialisai dan penguatan kelembagaan sampai tingkat pedukuhan melalui tim penanggulangan kemiskinan di masing-masing pedukuhan. Untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan dilakukan strategi sebagai berikut:

- (1) Validasi data;
- (2) Pengurangan beban;
- (3) Pemberdayaan;
- (4) Penguatan kelembagaan;
- (5) Penguatan mental keluarga miskin dengan meminimalisir penyebab kemiskinan;
- (6) Mengupayakan pranata dan nilai-nilai sosial yang mengkayakan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja tersebut diatas dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, dengan realisasi anggran sebagai berikut:

Tabel. Realisasi Anggaran 2016

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp1.000.000,00	Rp215.000,00 (21,50%)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp25.000.000,00	Rp1.052.500,00 (92,28%)
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp45.000.000,00	Rp32.880.000,00 (73,06%)
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp2.500.000,00	Rp. 2.498.900,00 (99,96%)
Penyediaan alat tulis kantor	Rp20.000.000,00	Rp1.884.750,00

		(9,42%)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp14.990.000,00	Rp9.067.680,00 (60,49%)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp15.000.000,00	Rp1.052.500,00 (7,02%)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp8.500.000,00	Rp2.076.000,00 (24,42%)
Penyediaan makanan dan minuman	Rp20.000.000,00	Rp19.580.500,00 (97,90%)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp1.128.010.000,00	Rp738.784.175,00 (65,49%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Pembangunan gedung kantor	Rp. 200.000.000,00	Rp.194.600.000,00 (97,3%)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 115.000.000,00	Rp. 64.955.652,00 (56,48%)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 35.000.000,00	Rp. 10.775.000,00 (30,79%)
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 513.100.000,00	Rp. 320.636.568,00 (62,49%)

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Pembinaan Disiplin Aparatur	Rp15.000.000,00	Rp2.300.000,00 (15.33%)
-----------------------------	-----------------	----------------------------

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi	Rp60.000.000,00	Rp10.650.000,00 (17.75%)
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Perencanaan	Rp92.120.000,00	Rp16.500.000,00 (17.91%)

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp5.430.000,00	Rp0 (0%)
--	----------------	-------------

6. Program pengembangan data/informasi

Penyusunan profile daerah	Rp70,900,000.00	Rp40,239,300.00 (56.76%)
Penyusunan peta tematik	Rp71,320,000.00	Rp55,123,500.00

		(77.29%)
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Rp82,760,000.00	Rp54,822,000.00 (66.24%)

7. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Jaring Informasi Riset Daerah	Rp65,700,000.00	Rp48,002,970.00 (73.06%)
-------------------------------	-----------------	-----------------------------

8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Perencanaan dan pengembangan Kebijakan Serta Pembangunan Jaringan LAN	30,600,000.00	21,775,000.00 (71.16%)
---	---------------	---------------------------

9. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Analisis Implikasi Kebijakan Tata Ruang, Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Terhadap Pengembangan Perumahan	Rp. 53.685.000,00	Rp. 51.937.690,00 (96,75%)
Penyusunan Proyeksi, Persoalan dan Tantangan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp. 53.685.000,00	Rp. 51.782.500,00 (96,46%)
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan dan Perumahan	Rp. 53.045.000,00	Rp. 51.418.250,00 (96,93%)

10. Program Perencanaan Tata Ruang

Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Rp39,475,000.00	Rp24,430,550.00 (61.89%)
Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS	Rp366,890,000.00	Rp353,718,875.00 (96.41%)
Sinkronisasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah	Rp80,980,000.00	Rp46,499,500.00 (57.42%)

11. Program Kerjasama Pembangunan

Pelayanan Perijinan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rp20.880.000,00	Rp13.255.500,00 (48.23%)
---	-----------------	-----------------------------

12. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan	Rp22.000.000,00	Rp18.673.950,00
------------------------	-----------------	-----------------

dokumen/arsip daerah		(84.88%)
----------------------	--	----------

13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Rp37.010.500,00	Rp32.934.750,00 (88,98%)
--	-----------------	-----------------------------

14. Program perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Rp. 96.240.000,00	Rp. 91.335.000,00 (94,90%)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp. 51.300.000,00	Rp. 14.515.750,00 (28,30%)
Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 171.600.000,00	Rp. 144.686.865,00 (84,32%)
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	Rp. 10.000.000,00	Rp. 2.736.000,00 (27,36%)
Evaluasi terhadap hasil RKPD	Rp. 15.000.000,00	Rp. 2.145.500,00 (14,30%)
Pengembangan sistem inovasi daerah	Rp. 143.870.000,00	Rp. 125.561.350,00 (87,27%)
Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang	Rp. 301.260.000,00	Rp. 276.836.220,00 (91,89%)
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	Rp. 11.000.000,00	Rp. 1.107.250,00 (10,07%)
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00 0%
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Rp. 6.450.000,00	Rp. 500.000,00 (7,75%)
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Rp. 3.465.000,00	0,00 0%
Penyusunan RPJMD	Rp. 214.040.000,00	178,462,807,00 (83,38%)
Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Rp. 7.805.000,00	Rp. 0,00 0%
Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD	Rp. 7.805.000,00	Rp. 0,00 0%
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD	Rp. 20.000.000,00	Rp. 500.000,00 (2,50%)
Studi Potensi Batuan Mulia di Kawasan Sungai Oya Bantul	Rp. 55.160.000,00	Rp. 0,00 0%
Pembangunan SIM Perencanaan	Rp. 375.650.000,00	Rp. 370.023.750,00 (98,50%)
Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian	Rp. 89.200.000,00	Rp. 0,00 0%
Studi Analisis Efektivitas Pelaksanaan	Rp. 57.650.000,00	Rp. 50.392.000,00

Musrenbang Kecamatan		(87,41%)
Studi Analisis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus	Rp. 57.650.000,00	51,020,000.00 (88,50%)

15. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Penyusunan indikator ekonomi daerah	Rp. 133.910.000,00	Rp. 125.502.650,00 (93,72%)
Implementasi pengembangan ekonomi daerah	Rp. 345.090.000,00	Rp. 316.834.360,00 (91,81%)
Pengelolaan Pengendalian Inflasi Daerah	Rp. 20.120.000,00	Rp. 40.77.500,00 (20,27%)
Penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP)	Rp. 198.320.000,00	Rp. 191.539.500,00 (96,58%)
Studi Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH)	Rp. 51.270.000,00	Rp. 51.009.900,00 (99,49%)
Studi Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Rp. 100.000.000,00	Rp. 96.392.300,00 (96,39%)
Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Rp. 375.000.000,00	Rp. 343.515.500,00 (91,60%)

16. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkantoran	Rp150.000.000,00	Rp143.030.000,00 (95.35)%
---	------------------	------------------------------

17. Program perencanaan sosial dan budaya

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp. 19.456.500,00	Rp. 15.295.500,00 (78,61%)
Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia (IPM/HDI)	Rp. 40.360.000,00	Rp. 28.000.000,00 (69,38%)
Koordinasi program-program pemerintahan dan pemberdayaan	Rp. 283.595.000,00	Rp. 270.631.190,00 (95,43%)
Pelaksanaan TKPK	Rp. 72.245.000,00	Rp. 63.534.500,00 (87,94%)
Monitoring dan Evaluasi SDGs	Rp. 27.690.000,00	Rp. 12.670.800,00 (45,76%)
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi	Rp. 43.690.000,00	Rp. 24.612.725,00 (56,33%)
Studi Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Kalangan Pelajar di Kabupaten Bantul	Rp. 52.770.000,00	Rp. 52.184.250,00 (98,89%)
Studi Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah di Kabupaten Bantul	Rp. 52.670.000,00	Rp. 52.482.750,00 (99,64%)

Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Wisata berbasis Religi dan Budaya di Kecamatan Pleret	Rp. 47.630.000,00	Rp. 47.162.000,00 (99,02%)
Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Program-program Penanggulangan Kemiskinan	Rp. 214.800.000,00	Rp. 206.700.950,00 (96,23%)
Penyusunan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Perda Penanggulangan Kemiskinan	Rp. 10.200.000,00	Rp. 5.020.000,00 (49,22%)
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak	Rp. 14.930.000,00	Rp. 5.627.500,00 (37,69%)
Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan	Rp. 16.620.000,00	Rp. 14.773.400,00 (88,89%)
Studi Kecukupan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 62.326.000,00 (62,33%)

18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Peningkatan pengelolaan irigasi (WISMP)	Rp150,000,000.00	Rp88,343,300.00 (58,90%)
Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)	Rp136,550,000.00	Rp130,086,900.00 (95,27%)

19. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp8,730,000.00	Rp0.00 (0%)
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD	Rp53,045,000.00	Rp51,272,500.00 (96,66%)

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2016 dari anggaran Rp7.752.602.000,00 dapat teraliris Rp6.176.013.387,00 atau 79,66%. Anggaran tersebut untuk mewujudkan dua sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Keselarasn Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD	100%	100%
		Persentase Rata-Rata Pencapaian Target Kinerja	90%	90%
		Persentase Program Kegiatan RKPD sesuai Musrenbang	70%	70%
2.	Meningkatnya masyarakat miskin penerima program kemiskinan	Persentase masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan	100%	100%